



# DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 09 JUNI 2026



## RINGKASAN BERITA HARI INI

### BANGKU POJOK



Athlet dan pelatih Cabor Wushu Sidoarjo dengan bangga, memegang piala Walikota Surabaya 2026.

### Athlet Wushu Sidoarjo Juara Umum I Piala Wali Kota Surabaya Sidoarjo, Bhirawa

Athlet Wushu Sidoarjo menyabet juara umum I, dalam Kejuraraan Wushu se Jatim, 4-7 Juni 2026, yang memperebutkan piala Wali Kota Surabaya 2026, yang digelar di gelangang remaja Surabaya. Dalam event ini diikuti 20 Pengkabar wushu se Jatim. Beberapa diantaranya termasuk pesaing berat Cabor Wushu Sidoarjo.

Athlet Wushu Sidoarjo yang bertanding dalam kelas Sanda itu, menyabet 3 medali emas dan 1 perunggu dalam nomor senior. Sedangkan pada nomor junior, mendapatkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu.

"Alhamdulillah," komentar Lukman, pelatih Wushu Sidoarjo, yang dikonfirmasi, Senin (8/6) kemarin.

Erwin Prakasa-pelatih Wushu kelas Sanda, ikut menambahkan tim wushu Sidoarjo mengirimkan 7 atlet, terdiri dari 4 atlet senior dan 3 atlet junior.

Dalam PORPROV IX 2025 lalu di Malang Raya, Cabor Wushu Sidoarjo meraih posisi runner up setelah Kota Malang. Medali yang didapat Sidoarjo, 2 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu.

"Semoga dalam PORPROV X 2027, juara umum Cabor Wushu, bisa kita rebut," komentar Erwin, bersemangat. Dalam Kejuraraan piala Wali Kota Surabaya itu, menurut Erwin, belum semua atlet Wushu senior Sidoarjo bisa turun. Sebab mereka masih sibuk, ada yang sedang kuliah dan bekerja. [kus.kt]

## Pemda Dilarang Rekrut Pegawai Baru

- Mendagri: Kalaulpun Ada, Hanya untuk Sektor Pendidikan-Kesehatan
- Pemerintah Beri Relaksasi Batas Belanja Pegawai 30 Persen

**JAKARTA** - Pemerintah memberi perpanjangan masa transisi pemberlakuan batas belanja pegawai melalui transfer keuangan daerah (TKD) maksimal 30 persen dari total APBD maksimal setahun. Dengan keputusan itu, pemerintah daerah (pemda) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan honorer kerja (HKD) dan honorer kerja (HKD) dan honorer kerja (HKD).

**Jumlah ASN Per Juni 2026**

- Jumlah ASN kurang lebih 6,2 juta
- 75 persen berada di instansi daerah. Sisanya, 25 persen di pusat
- Jumlah PNS mencapai 51 persen atau 3.417.000 pegawai
- Jumlah PPPK 49 persen atau 3.283.000, yang terdiri dari PPPK penuh waktu 31 persen dan PPPK paruh waktu 18 persen

Sumber: Kemen PANRB

## Anggaran Rp 42,64 Miliar, Proyek RSUD Sedati Digarap Juli

SIDOARJO - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati yang sempat mangkrak kembali dilanjutkan. Saat ini, lelang proyek sudah selesai dan pemanggunya juga sudah ditetapkan. Pemkab menyiapkan anggaran Rp 42,64 miliar untuk pembangunan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Laksmie Herawati Yuantina mengatakan, pemenang tender pembangunan RSUD Sedati sudah dipilih. Saat ini, masuk masa gagah. Proyek akan mulai digarap Juli.



Laksmie berharap, pembangunan RSUD Sedati kali ini bisa berjalan lancar hingga selesai sesuai target.

**LELANG ULANG:** Pembangunan RSUD Sedati ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Sebab, keberadaan rumah sakit tersebut penting untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat di wilayah Sidoarjo timur. "Harapannya pembangunan bisa berjalan sesuai target dan tidak ada kendala lagi," ujarnya.

Proyek pembangunan RSUD Sedati sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah pengerjaannya tidak rampung. Karena itu, kelanjutan proyek rumah sakit tersebut disorot. Pemkab menargetkan, proyek bisa tuntas tahun ini. Sehingga RSUD sudah beroperasi tahun 2027. (ful/hen)

## 87 Ton Sampah Belum Dikelola dengan Baik

**Bupati Minta Pemasangan CCTV di 210 TPS**

CCTV di 210 titik TPS. Hal tersebut untuk memantau aktivitas pengelolaan sampah dan kondisi operasional di masing-masing TPS secara langsung.

Sebab pembakaran ilegal Pit Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Muliono menjelaskan, dari total 892 ton sampah yang diproduksi setiap hari, sekitar 805 ton telah berhasil dikelola. Sedangkan sisanya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

"Ini yang menyebabkan pembakaran sampah secara liar," ujarnya.

Saat ini, kata Arif, pengelolaan sampah Kota Delta masih ditopang keberadaan TPS di tingkat desa. Sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)



MEMUNJUK: Ekskavator memindahkan sampah di TPS Ngampelsari, Candi. Pemkab mendorong pemilahan sampah dilakukan sejak di TPS.

## Tak Terima Hasil Pilkades, Calon Kades Balongdowo dan Pagerwojo Somasi Panitia

**Siap Gugat ke Pengadilan jika Diabaikan**

SIDOARJO - Pilkada serentak tahun 2026 memang sudah selesai digelar. Namun, masih banyak keluhan yang datang ke kades Balongdowo dan Pagerwojo, yakni terkait hasil penghitungan suara.

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Proses Penghitungan Suara Tak Mudah. Ketua Panitia Balongdowo dan Pagerwojo, Somasi Panitia, mengatakan, pihaknya telah mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

Menurut Laksmie, hasil penghitungan suara di tingkat desa, sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, pengangkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)

## Wabup Ajak Guk Yuk Cilik Jadi Duta Kreatif Promosi Wisata

**KOTA** - Upaya mengenalkan potensi wisata dan budaya Kabupaten Sidoarjo kini ditunjukkan sejak usia dini. Melalui ajang Pemilihan Duta Wisata Guk Yuk Cilik Sidoarjo 2026, generasi muda diharapkan menjadi agen promosi daerah yang kreatif, percaya diri, dan berwawasan budaya.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Wisata Guk Yuk Cilik Sidoarjo 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Minggu (7/6).

Menurut Mimik, Sidoarjo memiliki banyak potensi unggulan yang patut diperkenalkan lebih luas. Mulai dari destinasi wisata, sentra kerajinan tas dan sepatu, kuliner khas seperti lontong kupang, petis, dan kerupuk udang, hingga berbagai tradisi budaya yang menjadi identitas daerah.

"Siapa lagi yang akan memperkenalkan kekayaan tersebut jika bukan generasi muda penerus bangsa. Saya berharap seluruh finalis Guk Yuk Cilik mampu menjadi duta wisata yang mengenalkan potensi pariwisata, budaya, dan kearifan lokal Sidoarjo kepada masyarakat luas," ujarnya.

Mimik menegaskan, gelar Guk Yuk Cilik tidak boleh sekadar menjadi simbol atau prestasi semata. Para finalis dan pemenang diharapkan mampu menjalankan peran sebagai agen promosi daerah yang aktif dan inspiratif.

"Setelah terpilih nanti jangan hanya menyandang gelar. Harus ada aksi nyata, fadhil teladan bagi teman-teman sebaya dan ikut mempromosikan potensi Kabupaten Sidoarjo agar semakin dikenal dan membanggakan," tegasnya.

Juga menilai ajang tersebut memiliki nilai strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Selain melatih kepercayaan diri, kegiatan ini menjadi sarana menanamkan

meritokrasi pemerintahan secara bertahap. Terkait penguatan belanja pegawai, menurut Ferry ada beberapa item yang bisa dikurangi. "Mungkin nanti yang bisa dikurangi itu mengurangi perjalanan dinas dan seminar/seminar," ungkap Ferry.

Bagaimana dengan gaji dan tunjangan pegawai? Ferry mengaku belum bisa memberikan apakun-jangan ASN akan terdampak. "Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan anggaran lebih lanjut dapat terdapatnya. (na/ast/ast/ady/aph)

Menurut dia, ada seorang pejabat eselon I yang diduga menyalahgunakan 200 Satuan Pelayanan Perumahan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ironisnya, pejabat tersebut justru memiliki fungsi

seluruh kelas jabatan," katanya, kemarin.

Menurut Darul, jika tidak dikurangi, belanja pegawai bisa melonjak sampai 40 persen. Akumulasi pemotongan TPP dari sekitar 3.200 pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPPK paruh waktu, diperkirakan mampu menghemat anggaran daerah sekitar Rp 10-Rp 15 miliar.

Pemkot Kediri harus menengras belanja pegawai sebesar Rp 5,77 persen guna menginkubasi UY HKD. Pj Sekda Kota Kediri M. Ferry Djatmiko menuntaskan pemkot tengah memusnahkan kebijakan yang tepat

Menurut dia, ada seorang pejabat eselon I yang diduga menyalahgunakan 200 Satuan Pelayanan Perumahan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ironisnya, pejabat tersebut justru memiliki fungsi

seluruh kelas jabatan," katanya, kemarin.

Menurut Darul, jika tidak dikurangi, belanja pegawai bisa melonjak sampai 40 persen. Akumulasi pemotongan TPP dari sekitar 3.200 pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPPK paruh waktu, diperkirakan mampu menghemat anggaran daerah sekitar Rp 10-Rp 15 miliar.

Pemkot Kediri harus menengras belanja pegawai sebesar Rp 5,77 persen guna menginkubasi UY HKD. Pj Sekda Kota Kediri M. Ferry Djatmiko menuntaskan pemkot tengah memusnahkan kebijakan yang tepat



**POTENSI:** Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana berharap Guk Yuk Cilik Sidoarjo menjadi duta wisata muda untuk mempromosikan potensi wisata daerah.

## Wabup Ajak Guk Yuk Cilik Jadi Duta Kreatif Promosikan Wisata

**KOTA-**Upaya mengenalkan potensi wisata dan budaya Kabupaten Sidoarjo kini ditanamkan sejak usia dini. Melalui ajang Pemilihan Duta Wisata Guk Yuk Cilik Sidoarjo 2026, generasi muda dipersiapkan menjadi agen promosi daerah yang kreatif, percaya diri, dan berwawasan budaya.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Wisata Guk Yuk Cilik Sidoarjo 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Minggu (7/6).

Menurut Mimik, Sidoarjo memiliki banyak potensi unggulan yang patut diperkenalkan lebih

luas. Mulai dari destinasi wisata, sentra kerajinan tas dan sepatu, kuliner khas seperti lontong kupang, petis, dan kerupuk udang, hingga berbagai tradisi budaya yang menjadi identitas daerah.

“Siapa lagi yang akan memperkenalkan kekayaan tersebut jika bukan generasi muda penerus bangsa. Saya berharap seluruh finalis Guk Yuk Cilik mampu menjadi duta wisata yang mengenalkan potensi pariwisata, budaya, dan kearifan lokal Sidoarjo kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Mimik menegaskan, gelar Guk Yuk Cilik tidak boleh sekadar menjadi simbol atau

prestise semata. Para finalis dan pemenang diharapkan mampu menjalankan peran sebagai agen promosi daerah yang aktif dan inspiratif.

“Setelah terpilih nanti jangan hanya menyangand gelar. Harus ada aksi nyata. Jadilah teladan bagi teman-teman sebaya dan ikut mempromosikan potensi Kabupaten Sidoarjo agar semakin dikenal dan membanggakan,” tegasnya.

Ia juga menilai ajang tersebut memiliki nilai strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Selain melatih kepercayaan diri, kegiatan ini menjadi sarana menanamkan

● Ke Halaman 10

## Wabup Ajak...

kecintaan terhadap budaya, pariwisata, dan pembangunan daerah.

“Pemilihan Guk Yuk Cilik bukan hanya soal penampilan dan perlombaan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, percaya diri, berwawasan

budaya, serta memiliki kecintaan terhadap daerahnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Kabupaten Sidoarjo, Ruli Rochmawati, menjelaskan bahwa program Guk Yuk Cilik merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan rasa cinta generasi muda

terhadap potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif Sidoarjo.

Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk melahirkan duta wisata cilik yang memiliki wawasan kepariwisataan, kemampuan komunikasi yang baik, serta karakter positif sebagai representasi generasi muda Sidoarjo.

“Tujuan kegiatan ini

adalah menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Kabupaten Sidoarjo, membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kepariwisataan, keterampilan komunikasi, karakter positif, serta menyiapkan duta wisata cilik yang mampu menjadi agen promosi daerah yang kreatif dan inspiratif,” jelasnya. (dik/vga)

## Satpol PP Sasar 14 Titik Penjualan Rokok Ilegal

■ Sita 67.880 Batang

**RADAR SIDOARJO-** Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo bersama tim gabungan berhasil mengamankan 67.880 batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan rokok tanpa pita cukai yang digelar sepanjang Mei hingga awal Juni 2026.

Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan perundang-undangan sekaligus melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. Kegiatan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupa-

ten Sidoarjo yang terindikasi menjadi lokasi peredaran rokok ilegal.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Sidoarjo, Puguh Karyanto, mengatakan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Sidoarjo.

“Operasi ini kami lakukan secara rutin untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Selain merugikan negara

● Ke Halaman 10



**DIAMANKAN:** Personel Satpol PP Sidoarjo menunjukkan barang bukti rokok ilegal yang berhasil diamankan dalam operasi gabungan pemberantasan rokok tanpa pita cukai

### Satpol PP..

dari sisi penerimaan cukai, peredaran rokok ilegal juga menciptakan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Sidoarjo, Puguh Karyanto,

Dalam operasi yang digelar pada 18 Mei, 19 Mei,

dan 4 Juni 2026, petugas menasar sejumlah lokasi penjualan di Kecamatan Candi, Tanggulangin, Buduran, Sedati, Porong, dan Ploso. Tim gabungan memeriksa dan menemukan berbagai merek rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan di bi-

dang cukai. Berdasarkan data hasil operasi gabungan tahun 2026, total barang bukti yang berhasil diamankan adalah 67.880 batang rokok ilegal. Barang bukti tersebut ditemukan di sedikitnya 14 titik penjualan yang tersebar di se-

jumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Puguh menjelaskan, operasi gabungan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada para pedagang agar tidak menjual rokok ilegal. Satpol PP bersama

instansi terkait terus melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok legal serta konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang menjual rokok ilegal tanpa pita cukai resmi. “Kami mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk lebih teliti

saat membeli atau menjual rokok. Jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada petugas Satpol PP Sidoarjo atau tanpa pita cukai resmi.” katanya. Satpol PP Sidoarjo memastikan pengawasan dan penindakan terhadap pe-

redaran rokok ilegal akan terus ditingkatkan melalui sinergi dengan berbagai instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai. (sur/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Komisi D Desak Pemkab Susun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV/AIDS

KOTA-Tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius DPRD Sidoarjo. Hingga April 2026, jumlah kasus HIV/AIDS tercatat mencapai 7.129 orang dan terus menunjukkan tren peningkatan setiap bulan.

Merespons kondisi tersebut, Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai langkah konkret untuk memperkuat upaya pence-



Ketua Komisi D DPRD  
Sidoarjo Dhamroni Chudlori

gahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.

Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program pencegahan berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (dik/vga)



alikus/bhirawa

Atlet dan pelatih Cabor Wushu Sidoarjo dengan bangga, memegang piala Walikota Surabaya 2026.

## Atlet Wushu Sidoarjo Juara Umum I Piala Wali Kota Surabaya

### Sidoarjo, Bhirawa

Atlet Wushu Sidoarjo menyabet juara umum 1, dalam Kejuaraan Wushu se Jatim, 4-7 Juni 2026, yang memperebutkan piala Wali Kota Surabaya 2026, yang digelar di gelangang remaja Surabaya. Dalam event ini diikuti 20 Pengkhab wushu se Jatim. Beberapa diantaranya termasuk pesaing berat Cabor Wushu Sidoarjo.

Atlet Wushu Sidoarjo yang bertanding dalam kelas Sanda itu, menyabet 3 medali emas dan 1 perunggu dalam nomor senior. Sedangkan pada nomor junior, mendapatkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu.

"Alhamdulillah," komentar Lukman, pelatih Wushu Sidoarjo, saat dikonfirmasi, Senin (8/6) kemarin.

Erwin Prakasa-pelatih Wushu kelas Sanda, ikut menambahkan tim wushu Sidoarjo mengirimkan 7 atlit, terdiri dari 4 atlet senior dan 3 atlet junior.

Dalam PORPROV IX 2025 lalu di Malang Raya, Cabor Wushu Sidoarjo meraih posisi runner up setelah Kota Malang. Medali yang didapat Sidoarjo, 2 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu.

"Semoga dalam PORPROV X 2027, juara umum Cabor Wushu, bisa kita rebut," komentar Erwin, bersemangat. Dalam Kejuaraan piala Wali Kota Surabaya itu, menurut Erwin, belum semua atlet Wushu senior Sidoarjo bisa turun. Sebab mereka masih sibuk, ada yang sedang kuliah dan bekerja. [kus.kt]



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Tak Terima Hasil Pilkades, Calon Kades Balongdowo dan Pagerwojo Somasi Panitia

Siap Gugat ke Pengadilan jika Diabaikan

**SIDOARJO** – Pilkades serentak tahun 2026 memang telah selesai digelar. Namun, tak semua calon kades (cakades) legowo akan hasil pemilihan. Dua cakades yakni cakades Balongdowo dan Pagerwojo menolak hasil pilkades dan melayangkan somasi pada panitia.

Somasi dilayangkan melalui

kuasa hukum. Mereka meminta hasil pilkades dibatalkan. Jika tidak ada tindakan dari panitia atau pemerintah, cakades akan membawa persoalan ke pengadilan.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa PMD Sidoarjo Hernita Hadi Lestari membenarkan adanya somasi di dua desa tersebut. Somasi juga dilayangkan ke pemkab. "Memang ada yang mengajukan keberatan. Prosesnya masih dalam pembahasan," kata Hernita.

**Protes Perangkat Desa Tak Mundur**

Ketua Panitia Pilkades Balongdowo Lambang Setiono menjelaskan, somasi muncul karena adanya protes terhadap status cakadesterpilih yang sebelumnya perangkat desa. Menurut pengugat, hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2026 yang menyebut calon dari perangkat desa harus mengundurkan diri setelah penetapan calon.

Menurut Lambang, saat penetapan, pemkab memang belum memutuskan terkait masalah

pengunduran diri cakades yang berstatus perangkat. Saat itu, pemkab masih berkonsultasi dengan Kemendagri.

"Pengunduran diri cakades yang berstatus perangkat disampaikan 22 Mei atau dua hari sebelum pemungutan," kata Lambang. Dia menjelaskan, panitia masih akan membahas terkait gugatan peserta pilkades.

**Anggap Janggal Kerusakan Surat Suara**  
Sementara itu, somasi di Desa Pagerwojo dipicu banyaknya

surat suara tidak sah dalam pilkades. Sekretaris Desa Pagerwojo Nanang menyebut jumlah surat suara tidak sah mencapai 1.482 lembar. "Jumlah surat suara yang tidak sah itu dianggap janggal," kata Nanang.

Dalam hasil penghitungan suara Pilkades Pagerwojo, calon nomor urut 1 memperoleh 171 suara. Nomor urut 2 meraih 1.812 suara dan nomor urut 3 memperoleh 2.346 suara. Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkades tersebut sebanyak 9.400 pemilih. (ful/hen)

Memang ada yang mengajukan keberatan. Prosesnya masih dalam pembahasan."

**Hernita Hadi Lestari**  
Kabid Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa DPMD Sidoarjo



## Jawa Pos

### Anggaran Rp 42,64 Miliar, Proyek RSUD Sedati Digarap Juli

**SIDOARJO** – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati yang sempat mangkrak kembali dilanjutkan. Saat ini, lelang proyek sudah selesai dan pemenangnya juga sudah ditetapkan. Pemkab menyiapkan anggaran Rp 42,64 miliar untuk pembangunan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuantina mengatakan, pemenang tender pembangunan RSUD Sedati sudah dipilih. Saat ini, masuk masa sanggah. Proyek akan mulai digarap Juli.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Lakhsmie berharap, pembangunan RSUD Sedati kali

ini bisa berjalan lancar hingga selesai sesuai target.

Sebab, keberadaan rumah sakit tersebut penting untuk

mendukung layanan kesehatan masyarakat di wilayah Sidoarjo timur. "Harapannya pembangunan bisa berjalan sesuai target dan tidak ada kendala lagi," ujarnya.

Proyek pembangunan RSUD Sedati sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah pengerjaannya tidak rampung. Karena itu, kelanjutan proyek rumah sakit tersebut disorot. Pemkab menargetkan, proyek bisa tuntas tahun ini. Sehingga RSUD sudah beroperasi tahun 2027. (ful/hen)

**LELANG ULANG:**  
Pembangunan RSUD Sedati ditargetkan selesai akhir tahun ini.

## Jawa Pos

## 87 Ton Sampah Belum Dikelola dengan Baik

### Bupati Minta Pemasangan CCTV di 210 TPS

**SIDOARJO** - Produksi sampah di Kota Delta mencapai 892 ton per hari. Saat ini, belum semua sampah mampu dikelola secara baik. Ada 87 ton sampah yang belum melalui proses pemilahan.

Sampah-sampah yang belum terkelola berasal dari TPS yang tidak aktif. Sebagian besar limbah dibakar tanpa dikirim ke TPA. Bupati Sidoarjo Subandi mendorong penggunaan sistem dashboard digital untuk memantau pengelolaan sampah hingga tingkat desa. Sistem tersebut dipakai untuk mengevaluasi pengelolaan sampah secara terintegrasi berbasis data lapangan.

"Harus kita kelola berbasis data. Semua harus turun tangan mendukung masyarakat," katanya kemarin (8/6). Bupati meminta pemasangan

CCTV di 210 titik TPS. Hal tersebut untuk memantau aktivitas pengelolaan sampah dan kondisi operasional di masing-masing TPST secara langsung.

### Sebabkan Pembakaran Ilegal

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menjelaskan, dari total 892 ton sampah yang diproduksi setiap hari, sekitar 805 ton telah berhasil dikelola. Sedangkan sisanya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. "Ini yang menyebabkan masih adanya pembakaran sampah secara liar," ujarnya.

Saat ini, kata Arif, pengelolaan sampah Kota Delta masih ditopang keberadaan TPST di tingkat desa. Sistem tersebut mengandalkan iuran masyarakat untuk mendukung operasional. Menurut Arif, angkutan residu sampah menuju TPA dilakukan menggunakan 80 armada truk. (ful/hen)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**MENUMPUK:** Ekskavator memindahkan sampah di TPS Ngampelsari, Candi. Pemkab mendorong pemilahan sampah dilakukan sejak di TPS.

# Pemda Dilarang Rekrut Pegawai Baru

- Mendagri: Kalaupun Ada, Hanya untuk Sektor Pendidikan-Kesehatan
- Pemerintah Beri Relaksasi Batas Belanja Pegawai 30 Persen

**JAKARTA** - Pemerintah memberi perpanjangan masa transisi pemberlakuan batas belanja pegawai melalui transfer keuangan daerah (TKD) maksimal 30 persen dari total APBD maksimal setahun. Dengan keputusan itu, pemerintah daerah (pemda) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan honorer hingga akhir 2027. Meski mendapatkan relaksasi, kabupaten/kota diminta tidak merekrut pegawai baru, khususnya honorer ■

*Baca Pemda... Hal 4*

## Jumlah ASN Per Juni 2026:

- Jumlah ASN kurang lebih **6,7 juta**
- **75 persen** berada di instansi daerah. Sisanya, 25 persen di pusat
- Jumlah PNS mencapai **51 persen** atau **3.417.000** pegawai
- Jumlah PPPK **49 persen** atau **3.283.000**, yang terdiri dari PPPK penuh waktu **31 persen** dan PPPK paruh waktu **18 persen**



Sumber: Kemen PANRB

GRAFIS: HERLABANG/JAWA POS

# Jawa Pos

### Pemda Dilarang Rekrut Pegawai Baru

Sambungan dari Hal 1

Keputusan disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat kerja bersama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyanti, Komisi II DPRD, serta sejumlah gubernur, di Jakarta, kemarin (8/6). Tito mengatakan, pemerintah akan memberikan perpanjangan masa transisi paling lama setahun dari sebelumnya berakhir awal tahun ini sesuai UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Kepastian ini akan diatur dalam Undang-Undang APBN 2027 yang disusun dalam waktu dekat. Melalui relaksasi itu, pemda masih bisa memanfaatkan aturan maksimal 30 persen belanja pegawai untuk menggaji PPPK dan honorer hingga akhir 2027. Selain itu, pemda juga masih punya waktu untuk mencari solusi menambah Penda-

patan Asli Daerah (PAD), mengingat, ada beberapa daerah yang TKD belanja pegawainya saat ini sudah melebihi 30 persen sehingga mengeluhkan tak ada dana lagi untuk membayar PPPK. "Jadi, masih ada waktu untuk berpikir dan bekerja," ujar Tito. Ketetapan itu diambil saat rapat pada 7 Mei 2026 lalu, di Kantor KemenPANRB yang dihadiri oleh Mendagri, MenPANRB, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Tito, dirinya sempat mengusulkan agar batasan persentase TKD tidak saktak 30 persen. Namun, bisa lebih fleksibel menjadi 40-50 persen, bergantung dari fiskal daerah. Penerapannya dapat diatur dengan keputusan Menkeu. Namun, setelah ditelusuri, ada daerah yang belanja pegawainya sudah sampai 61 persen. Karena itu, Menkeu tidak setuju dengan usulan tersebut lantaran khawatir daerah akan terlena dan tidak mau berusaha mencari sumber PAD

yang kreatif, atau menyehatkan BUMD-nya. Meski memberikan relaksasi, Tito mewanti-wanti kepala daerah untuk tidak membuka rekrutmen pegawai baru, khususnya honorer karena sudah dimotorium. Kalaupun ada rekrutmen PPPK, maka hanya difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. "Tapi, kalau untuk yang tenaga administrasi, sering kali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya, mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses, dimasukkan di sana, datang jam 8 pulang jam 10, itu jadi beban," terangnya.

#### Cegah PHK

MenPANRB Rini Widyanti menyebut, pemerintah berupaya mencegah terjadinya pengurangan pegawai besar-besaran pada para honorer yang gagal seleksi CASN. Salah satunya, lewat seleksi PPPK paruh waktu. Dia menjelaskan, sejak pendataan tenaga non-

ASN pada 2022, tercatat sekitar 1,78 juta pegawai yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, persoalannya, instansi pemerintah hanya mengusulkan sekitar 1,01 juta formasi. Dari jumlah itu, peserta yang mengikuti seleksi tahap awal hanya sekitar 689 ribu orang. Menurutnya, hal ini lantaran sebagian tenaga honorer tidak mendaftar, memilih jalur CPNS, atau formasi ditunda oleh instansi masing-masing. Karena itu, pemerintah membuka skema PPPK paruh waktu untuk tenaga non-ASN yang sudah mengikuti seleksi tetapi belum memperoleh formasi. "Mereka tetap diberikan nomor induk PPPK, kontrak kerja minimal satu tahun, dan dapat diusulkan menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap sesuai evaluasi kinerja dan kemampuan anggaran," jelasnya.

**Kondisi di Daerah**  
Aturan maksimal belanja pegawai 30 persen dalam UU

1/2022 menjadi tantangan berat bagi Pemkot Blitar. Pada APBD 2026, porsi belanja pegawai justru membengkak hingga 37,78 persen. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Blitar Darul Efendi menyampaikan, untuk menengger nilai tersebut, Pemkot mengambil langkah ekstrem dengan memotong (TPP) sebesar 15 persen secara merata, mulai dari staf hingga sekretaris daerah (sekda). "Pengurangan TPP 15 persen itu berlaku untuk semua, termasuk sekda. Diterapkan merata ke

seluruh kelas jabatan," katanya, kemarin. Menurut Darul, jika tidak dikurangi, belanja pegawai bisa melonjak sampai 40 persen. Akumulasi pemotongan TPP dari sekitar 3.200 pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu, diperkirakan mampu menghemat anggaran daerah sekitar Rp 10-Rp 15 miliar. Pemkot Kediri harus mengeprasi belanja pegawai sebesar 9,57 persen guna mengikuti UU HKPD. Pj Sekda Kota Kediri M. Ferry Djatmiko menuturkan, Pemkot tengah merumuskan kebijakan yang tepat

merespons pemberlakuan aturan tersebut. Terkait pengurangan belanja pegawai, menurut Ferry ada beberapa item yang bisa dikurangi. "Mungkin nanti yang bisa dilakukan itu mengurangi perjalanan dinas dan seminar-seminar," ungkap Ferry. Bagaimana dengan gaji dan tunjangan pegawai? Ferry mengaku belum bisa membeberkan apakah tunjangan ASN akan terdampak. "Kami masih berkoordinasi sembari menunggu arahan lebih lanjut dari pusat," terangnya. (mia/ais/sat/ady/aph)

### MAKI Laporkan Pejabat BGN yang Punya Puluhan Dapur MBG

Sambungan dari Hal 1

Menurut dia, ada seorang pejabat eselon I yang diduga menguasai sekitar 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ironisnya, pejabat tersebut justru memiliki fungsi pengawasan di internal



# Jawa Pos

BKD Sambang Hadir

## Dekatkan Layanan Kepegawaian untuk Ribuan ASN Sidoarjo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo menghadirkan inovasi BKD Sambang (Safari Manajemen, Bimbingan, dan Layanan Langsung) yang mendekatkan layanan kepegawaian langsung kepada ASN di berbagai wilayah.

Program jemput bola tersebut memungkinkan ASN mengakses layanan administrasi kepegawaian, konsultasi, hingga konseling tanpa harus datang ke kantor BKD.

Sekretaris BKD Sidoarjo Ronny Yulianowarso mengatakan BKD Sambang merupakan inovasi yang dibuat untuk mempermudah ASN mendapatkan layanan sekaligus efisiensi waktu untuk mengurus administrasi kepegawaian.

"BKD Sambang ini adalah sebuah kegiatan inovasi dari teman-teman BKD yang tujuannya adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat ASN. Bahkan administrasinya kita tuntaskan di lapangan," kata Ronny, Senin (8/6/2026).

Salah satu sasaran lokasi pelaksanaan program ini adalah satuan pendidikan. Menurut Ronny, banyak guru yang kesulitan meninggalkan tugas mengajar saat harus mengurus kebutuhan administrasi kepegawaian. "Kami tidak ingin teman-teman di satuan pendidikan itu kerepotan sehingga kami berada di lapangan supaya mereka bisa mendapatkan layanan itu," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, BKD Sambang tidak hanya membuka layanan administrasi dan pengurusan dokumen kepegawaian, BKD juga memanfaatkan kegiatan itu untuk menyosialisasikan regulasi terbaru kepada ASN.

"Jadi sebelum open table layanan, kita ada sesi materi, biasanya kita sampaikan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang baru supaya teman-teman ASN update dengan ketentuan-ketentuan," jelasnya.

Selain itu, ASN juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi karier yang disediakan BKD. Layanan tersebut membantu ASN merencanakan pengembangan kompetensi dan jenjang karier sesuai kebutuhan organisasi maupun minat pegawai. (md/rus)



Pertemuan antara BKD dan ASN Sidoarjo.

## WABUP SIDOARJO: GUKYUK CILIK PEMBENTUKAN KARAKTER JADI DUTA PROMOSI WISATA DAN BUDAYA

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Wisata Gukyuk Cilik Sidoarjo Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Minggu (7/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan mempromosikan potensi wisata serta budaya Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Wabup Mimik Idayana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Pemilihan Duta Wisata Gukyuk Cilik bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana pembentukan karakter generasi muda agar memiliki rasa percaya diri, kreativitas, wawasan budaya, serta kepedulian terhadap pembangunan daerah.

"Pemilihan Gukyuk Cilik bukan hanya tentang penampilan dan perlombaan. Kegiatan ini merupakan wadah untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, percaya diri, berwawasan budaya, serta memiliki kecintaan terhadap pariwisata daerahnya," ujar Mimik.

Ia mengatakan Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai potensi unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari



wisata alam, sentra kerajinan tas dan sepatu, kuliner khas seperti lontong kupang, petis dan kerupuk udang, hingga berbagai tradisi budaya yang harus terus dilestarikan.

"Siapa lagi yang akan memperkenalkan kekayaan tersebut jika bukan kalian, generasi muda penerus bangsa. Saya berharap seluruh finalis Gukyuk Cilik mampu menjadi duta wisata yang mengenalkan potensi pariwisata, budaya, dan kearifan lokal Sidoarjo kepada masyarakat luas," katanya.

Kepada para finalis yang nantinya terpilih sebagai Gukyuk Cilik Sidoarjo Tahun 2026, ia meminta agar mampu menjalankan amanah dengan baik serta aktif mempromosikan berbagai ikon dan destinasi wisata Kabupaten Sidoarjo.

"Setelah terpilih nanti

jangan hanya menyandang gelar. Harus ada aksi nyata. Jadilah teladan bagi teman-teman sebaya dan ikut mempromosikan potensi Kabupaten Sidoarjo agar semakin dikenal dan membanggakan," pesannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Ruli Rochmawati, menyampaikan bahwa kegiatan Pemilihan Duta Wisata Gukyuk Cilik Sidoarjo Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif daerah.

Ruli menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kepariwisataan, keterampilan

komunikasi, karakter positif, serta menyiapkan duta wisata cilik yang mampu menjadi agen promosi daerah yang kreatif dan inspiratif.

"Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Kabupaten Sidoarjo, membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kepariwisataan, keterampilan komunikasi, karakter positif, serta menyiapkan duta wisata cilik yang mampu menjadi agen promosi daerah yang kreatif dan inspiratif," jelasnya.

Proses pemilihan diawali dengan pendaftaran dan seleksi administrasi yang diikuti putra-putri terbaik Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya para peserta mengikuti berbagai tahapan seleksi dan pembekalan meliputi wawasan kepariwisataan, pengetahuan budaya daerah,

kemampuan komunikasi, bakat, kepribadian, hingga pemahaman mengenai potensi wisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Sidoarjo.

Dari seluruh peserta yang mengikuti rangkaian seleksi, terpilih 20 finalis terbaik yang tampil pada grand final. Mereka merupakan siswa-siswi sekolah dasar atau sederajat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki minat dan pengetahuan dasar mengenai pariwisata, budaya serta potensi daerah.

Pada malam puncak grand final, dewan juri menetapkan Gukyuk Cilik Sidoarjo 2026 diraih oleh Guk cilik Joysen dari SD Kristen Petra 12 Sidoarjo dan Yuk Cilik Sidoarjo 2026 diraih oleh Chika dari SDN Pucang 2 Sidoarjo. Keduanya diharapkan mampu menjadi wajah pariwisata cilik Kabupaten Sidoarjo sekaligus berperan aktif dalam memperkenalkan berbagai destinasi wisata, budaya, dan potensi unggulan daerah kepada masyarakat luas.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir generasi muda yang berkarakter, kreatif, berwawasan budaya, sekaligus menjadi agen promosi wisata yang mampu memperkenalkan berbagai destinasi dan potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat luas. (Khol/Dy)



# Anggaran BBM Truk TPA Sampah Jabon Terancam Habis, Terimbas Perang AS vs Iran

9 Jun 2026 05:38



Fathur Roziq  
Editor



Truk-truk pengangkut sampah sedang membongkar muatan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Jabon, Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)

Politik & Pemerintahan



Aa AA

**KETIK, SIDOARJO** – Kepala Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo atau TPA Sampah Jabon Hajid Arif Hidayat cemas. Gara-gara harga BBM naik, anggaran untuk truk-truk pengangkut sampah terancam cepat habis. Nilainya miliaran rupiah.

"Ternyata perang Amerika Serikat dan Israel lawan Iran berdampak ke TPA Jabon. Saya sampai tidak bisa tidur," katanya kepada Bupati Subandi saat pertemuan DLHK Sidoarjo, Bappeda Sidoarjo, Kominfo Sidoarjo, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo pada Senin (8 Juni 2026).

Perang AS versus Israel telah masuk pada bulan keempat sejak Februari 2026 lalu. Konflik bersenjata tersebut menghalangi distribusi minyak global lewat Selat Hormuz sehingga memicu kenaikan harga minyak dunia. Indonesia pun terimbas. Harga BBM nasional pun naik.

Hajid Arif Hidayat mengaku khawatir bila harga BBM jenis solar ini terus naik. Biaya pembelian BBM juga ikut naik. Harga BBM solar untuk jenis Dexlite sekitar Rp 23 ribu per liter. Harga Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Truk-truk pengangkut sampah tergolong kendaraan dinas sehingga tidak bisa memakai BBM subsidi, biosolar. Jumlahnya sekitar 200 unit truk.

"Anggaran BBM untuk truk TPA Jabon bisa habis cuma sampai bulan 9 (September 2026)," ungkap Hajid Arif Hidayat.

#### Baca Juga:

[Sampah di Sidoarjo Capai 892 Ton Per Hari, Begini Cara DLHK Sidoarjo Mengatasi](#)

Dia menyebutkan, anggaran untuk TPA Sampah Jabon terkena efisiensi hingga Rp 13 miliar pada 2026 ini. DLHK Sidoarjo mengalokasikan anggaran untuk truk-truk sampah di TPA Sampah Jabon Sidoarjo sekitar Rp 6,8 miliar dalam APBD 2026.

Jika harga BBM terus naik, maka anggaran yang mestinya bisa disiapkan sampai akhir tahun 2026 itu bakal habis. Untuk itu, dibutuhkan anggaran cadangan. Nilainya diperkirakan sekitar Rp 3,4 miliar. Jumlah itu tidak hanya untuk kebutuhan sampai akhir tahun 2026, tetapi dicadangkan pula untuk awal-awal tahun anggaran 2027.

"Kami butuh dukungan," ucap Hajid Arif Hidayat.

Asisten 2 (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) Bahrul Amig menyarankan pengelola BLUD TPA Sampah Jabon dan DLHK Sidoarjo untuk bersurat secara resmi tentang keluhan tersebut. Surat ditujukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo.

#### Baca Juga:

[Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo Ubah Air Sumur TPA Sampah Jabon Menjadi Layak Langsung Minum](#)

Bupati Subandi menanggapi keluhan terkait biaya BBM untuk truk-truk sampah di TPA Sampah Jabon tersebut. Bupati Subandi berpesan kepada Kepala Bappeda Sidoarjo M. Ainur Rahman untuk membahas kebutuhan anggaran TPA Sampa Jabon tersebut. Ini demi kepentingan masyarakat.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

PROGRESJATIM.COM



Beranda » Advtorial »

## Ketua DPRD : Seleksi Direksi Delta Tirta Harus Sesuai Aturan, Komisi B Diminta Awasi Ketat

June 8, 2026 - 75 Views



Progres jatim.com, SIDOARJO – Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, angkat bicara terkait munculnya dugaan kejanggalan dalam proses seleksi Direksi Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi harus dilaksanakan secara transparan dan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi (Pansel).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai adanya peserta yang diduga lolos seleksi administrasi meski belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan, termasuk syarat pengalaman manajerial dan kepemilikan sertifikasi tertentu.



ketua DPRD Abdillah Nasih saat memberikan pernyataan kepada progres jatim.com Jum'at (5/6/2026), di ruang kerjanya.

Menurut Abdillah Nasih, proses rekrutmen direksi Perumda Delta Tirta tidak boleh dipandang sekadar sebagai pengisian jabatan, melainkan harus menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja perusahaan daerah yang mengelola layanan air minum bagi masyarakat Sidoarjo.

"Yang bisa saya sampaikan kepada media adalah transparansi mekanisme seluruh persyaratan itu harus disesuaikan dengan aturan yang ada. Rekrutmen ini harus menjadi starting point untuk pembenahan di semua aspek PDAM," ujarnya kepada progres jatim.com Jumat (5/6/2026) di ruang kerjanya

Ia menilai direksi yang terpilih nantinya harus mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah Perumda Delta Tirta. Mulai dari tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW), perluasan cakupan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, hingga efisiensi operasional perusahaan.

"Direksi yang terpilih nanti harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan perusahaan. Mulai dari tingkat kehilangan air, cakupan layanan yang masih belum maksimal, kualitas pelayanan, sampai berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat," katanya.

Sorotan publik terhadap seleksi direksi menguat setelah muncul pertanyaan mengenai pemenuhan syarat pengalaman manajerial oleh sejumlah peserta yang dinyatakan lolos administrasi.

Berdasarkan ketentuan seleksi yang beredar, calon direksi diwajibkan memiliki pengalaman manajerial paling sedikit lima tahun pada jabatan kepala bagian, kepala seksi, atau jabatan lain yang setara. Persyaratan tersebut menjadi salah satu indikator untuk memastikan calon direksi memiliki kapasitas kepemimpinan dan pengalaman mengelola organisasi.

Namun, sejumlah pihak mempertanyakan apakah seluruh peserta yang lolos administrasi benar-benar telah memenuhi syarat tersebut. Selain itu, muncul pula dugaan adanya peserta yang belum mengantongi salah satu sertifikasi yang dipersyaratkan, tetapi tetap dinyatakan lolos dalam tahapan administrasi.

Menanggapi hal itu, Abdillah Nasih meminta agar seluruh persyaratan diverifikasi secara objektif dan diterapkan secara sama kepada seluruh peserta.

"Kalau memang persyaratan itu mutlak berlaku untuk semua posisi direksi, tentu harus dipastikan seluruh peserta memenuhi syarat tersebut. Tetapi kita juga harus melihat dulu secara lengkap apakah ketentuan itu berlaku sama untuk semua jabatan direksi atau ada pengkhususan tertentu. Itu yang harus dicek," ujarnya.

Ia menegaskan, yang menjadi perhatian DPRD bukan hanya soal siapa yang lolos dan siapa yang gugur, melainkan konsistensi panitia seleksi dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

PROGRESJATIM.COM  
Jendela Informasi Anda

"Yang penting prosesnya transparan dan sesuai mekanisme yang ada. Jangan sampai ada persepsi di masyarakat bahwa aturan dibuat tetapi penerapannya berbeda," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Meski demikian, Abdillah Nash mengaku belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran dalam proses seleksi karena DPRD tidak memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan rekrutmen direksi.

"Saya tidak akan berandai-andai karena DPRD tidak terlibat langsung dalam proses seleksi. Tetapi sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, saya akan meminta teman-teman di Komisi B untuk terus melakukan monitoring dan pengawasan," katanya.

Menurutnya, pengawasan DPRD perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, uji kompetensi, wawancara, hingga penetapan calon direksi terpilih.

"Kita tidak bisa melihat secara parsial. Yang harus dilihat adalah keseluruhan proses dan tahapan pelaksanaannya sehingga fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan," ujarnya.

Di tengah berbagai pertanyaan yang berkembang, Abdillah Nash mengaku masih memberikan kepercayaan kepada panitia seleksi untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan menjaga integritas proses rekrutmen.

"Sementara ini kami masih positive thinking. Kita percaya kepada panel terkait kredibilitas mereka untuk menegakkan aturan dan menjalankan proses sesuai ketentuan," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi kepada publik tetap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi direksi perusahaan daerah tersebut.

Hingga Jumat (5/6/2026), proses seleksi Direksi Perumda Delta Tirta masih berlangsung dan memasuki tahapan lanjutan. Sementara itu, pertanyaan publik mengenai verifikasi syarat pengalaman manajerial minimal lima tahun serta pemenuhan sertifikasi kompetensi oleh peserta yang lolos administrasi masih menjadi perhatian berbagai kalangan.

DPRD Sidoarjo pun memastikan akan terus mencermati perkembangan proses seleksi tersebut guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, transparan, dan menghasilkan direksi yang benar-benar memiliki kapasitas untuk membawa Perumda Delta Tirta menjadi lebih profesional dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

permasalahan bermula dari Panitia Seleksi Calon Direksi (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo, meloloskan Dugaan Peserta Belum Penuhi Syarat Manajerial Lolos Administrasi, Seleksi Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo Jadi Sorotan. Ditengah tuntutan transparansi publik

Informasi tersebut diperoleh progres.jatim.com dari sumber yang meminta identitasnya dihapuskan. Sumber itu menyebut terdapat peserta yang riwayat jabatannya lebih banyak berada pada level kepala seksi maupun asisten manajer, namun namanya tetap masuk dalam daftar peserta yang lolos seleksi administrasi.

Jika informasi tersebut benar, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana Panitia Seleksi (Pansel) melakukan verifikasi terhadap syarat pengalaman manajerial yang menjadi salah satu persyaratan utama calon direksi.

"Yang menjadi pertanyaan bukan siapa orangnya, tetapi bagaimana proses verifikasinya. Apakah pengalaman yang dimiliki benar-benar memenuhi syarat manajerial lima tahun atau tidak. Itu yang perlu dijelaskan kepada publik," ujar sumber tersebut.

Informasi itu memang belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi. Namun karena menyangkut proses pengisian jabatan strategis, persoalan tersebut dinilai memiliki kepentingan publik yang besar untuk diklarifikasi.

Perumda Delta Tirta Sidoarjo bukan sekadar perusahaan daerah biasa. BUMD ini mengelola layanan air bersih yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta mengelola aset dan anggaran bernilai besar. Karena itu, integritas proses seleksi direksi menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas tata kelola perusahaan ke depan.

Sorotan terhadap syarat pengalaman manajerial bukan tanpa alasan. Dalam berbagai regulasi pengelolaan BUMD, pengalaman kepemimpinan dan kemampuan manajerial menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan direksi yang terpilih memiliki kapasitas mengambil keputusan strategis, mengelola sumber daya manusia, serta menjalankan tata kelola perusahaan secara profesional.

Munculnya informasi mengenai dugaan peserta yang belum memenuhi syarat pengalaman manajerial membuat perhatian publik kini bergeser pada proses verifikasi yang dilakukan Pansel.

Apakah Panitia Seleksi hanya melakukan pemeriksaan administratif berdasarkan dokumen yang diserahkan peserta, atau juga melakukan verifikasi faktual terhadap riwayat jabatan dan masa kerja yang diklaim dalam berkas pendaftaran?

Pertanyaan tersebut semakin relevan mengingat Komisi B DPRD Sidoarjo sendiri telah memberikan peringatan keras kepada Panitia Seleksi agar menjaga profesionalitas, netralitas, dan transparansi dalam seluruh tahapan seleksi.

Dalam hearing tertutup yang berlangsung pada Selasa (2/6/2026), Komisi B DPRD memanggil Ketua Pansel sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Aripudawati, Kepala Inspektoral Andjar Surjadiyanto, serta Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Bachrul Amiq.

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, menegaskan bahwa proses seleksi harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak manapun.

"Kami berharap Pansel wajib menjalankan tugas secara profesional, transparan, objektif serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun. Pansel harus mengedepankan prinsip netralitas dan tidak memihak kepada calon tertentu," tegas Bambang.

Pernyataan tersebut dinilai menjadi pesan penting agar seluruh tahapan seleksi benar-benar dilaksanakan sesuai regulasi, termasuk dalam aspek verifikasi persyaratan peserta.

Komisi B juga menekankan bahwa proses seleksi harus mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, mulai dari PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 hingga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 553/4972/Keuda.

Selain syarat pengalaman manajerial, DPRD juga menyoroti aspek kompetensi calon direksi. Untuk jabatan Direktur Operasional, misalnya, calon diwajibkan telah memiliki Sertifikat Kompetensi Tingkat Madya yang diterbitkan BNSP atau lembaga sertifikasi resmi paling lambat 90 hari sebelum masa pendaftaran dibuka.

Karena itu, publik juga mempertanyakan bagaimana mekanisme Panitia Seleksi dalam memvalidasi keaslian dan kesesuaian sertifikat yang diajukan peserta.

Untuk memperoleh penjelasan yang berimbang, Jurnal Indopers.net telah mengirimkan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Ketua Panitia Seleksi Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Fenny Aripudawati (3/6/2026).

Dalam konfirmasi tersebut, awak media meminta penjelasan mengenai mekanisme verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Pansel untuk memastikan peserta memenuhi syarat pengalaman manajerial minimal lima tahun.

Awak media juga mempertanyakan apakah terdapat proses pendalaman terhadap dokumen pengalaman kerja peserta, bagaimana metode penilaian terhadap jabatan yang dikategorikan sebagai pengalaman manajerial, serta apakah dilakukan verifikasi langsung kepada instansi atau perusahaan tempat peserta bekerja.

Selain itu, juga meminta penjelasan mengenai mekanisme validasi sertifikat kompetensi yang digunakan peserta sebagai syarat mengikuti seleksi.

Namun hingga berita ini ditayangkan, Ketua Panitia Seleksi belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah pertanyaan yang diajukan.

Belum adanya penjelasan dari Panitia Seleksi membuat sejumlah pertanyaan publik masih menggantung. Apakah seluruh peserta yang lolos administrasi benar-benar telah memenuhi syarat pengalaman manajerial sebagaimana ketentuan yang berlaku? Bagaimana proses verifikasi dilakukan? Dan apakah terdapat mekanisme pemeriksaan ulang apabila muncul informasi yang meragukan validitas persyaratan peserta?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting bukan hanya untuk menjawab dugaan yang berkembang di masyarakat, tetapi juga untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses seleksi Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

Sebab dalam seleksi jabatan strategis BUMD, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang lolos, melainkan seberapa kuat integritas proses yang mengantarkan mereka menuju kursi pimpinan perusahaan.

(\*IGUS)

Post Views: 75



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

EKSKLUSIF.CO.ID



Home Kepolisian TNI DPR MPR Olahraga Pemerintah Kriminal Advetor

DEMI RAKYAT DAN BANGSA

Beranda > Pemerintah >

Pemerintah

## Pemkab Sidoarjo Perkuat Penanganan Sampah Berbasis Digital, Antisipasi Kapasitas TPA Jabon

Meja Redaksi 3 Min Baca  
Juni 8, 2026



**SIDOARJO, Eksklusif.co.id** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memetakan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai wilayah sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain pemetaan TPS 3R, Pemkab Sidoarjo juga mengembangkan sistem pengelolaan persampahan berbasis digital serta meningkatkan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Jabon, yang diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan apabila pola pengelolaan saat ini tidak segera dibenahi.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolaboratif oleh seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT hingga masyarakat.

“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi dengan tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait TPS 3R di Opsroom, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, seluruh kebijakan penanganan sampah akan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa langkah pembenahan harus segera dimulai agar persoalan sampah tidak semakin kompleks di masa mendatang.

“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan dashboard digital dalam pengelolaan persampahan. Sistem tersebut nantinya digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.

“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.

Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh TPS 3R yang ada. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah guna memperkuat kapasitas pengelolaan sampah di tingkat desa.

Berdasarkan data DLHK Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap harinya.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

(Red/Alf)

1791 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini



## DPRD Sidoarjo Dalam Aduan Kecurangan “Kunci Jawaban” Bocor di Seleksi Direksi Delta Tirta

Ruang Nurudin Minggu, 7 Jun 2026 65 Cetak

[Facebook](#) [Twitter](#) [Whatsapp](#) [Pinterest](#) [Threads](#)



DPRD Sidoarjo menindaklanjuti aduan dugaan kecurangan seleksi Direksi Delta Tirta, termasuk indikasi jawaban bocor dan rekaman CCTV.

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

A- A+

**Sidoarjo, Ruang.co.id** – Dugaan kecurangan dalam proses seleksi calon anggota Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo memasuki babak baru.

Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo berencana kembali memanggil Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Fenny Apridawati.

Pemanggilan itu menyusul adanya pengaduan masyarakat, terkait pelaksanaan uji kelayakan dan kompetensi, yang berlangsung di Gedung Psikologi dan Sumber Daya Manusia Mapolda Jawa Timur, Rabu (3/6/2026).

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, S.Sos., mengakui pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran dalam tahapan seleksi tersebut.

Aduan diterima melalui pesan singkat anonim chat WA (WhatsApp), yang mengklaim adanya tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh dua peserta seleksi pada saat ujian psikometri berlangsung.

Menurut isi laporan yang diterima, dua peserta yang mengikuti seleksi untuk posisi Direktur Pelayanan dan Direktur Operasional, diduga membawa catatan jawaban yang ditulis menggunakan bolpoin pada bagian kaki kiri.

Dugaan tersebut, disebut terjadi ketika peserta mengerjakan soal pilihan ganda, yang berkaitan dengan pencocokan gambar dan perhitungan angka.

Lebih jauh, pengirim pesan mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut, dan meminta DPRD melakukan pemeriksaan terhadap panitia seleksi.

Bahkan, laporan itu menyebut dugaan pelanggaran terekam kamera pengawas atau CCTV, sekitar pukul 16.30 WIB menjelang waktu magrib.

Pengadu juga meminta peserta yang terbukti melakukan kecurangan, didiskualifikasi demi menjaga integritas proses seleksi.

Menanggapi laporan tersebut, Bambang menegaskan, setiap informasi yang masuk akan menjadi bahan pengawasan DPRD. Meskipun identitas pelapor tidak diketahui, Komisi B memandang aduan tersebut perlu ditelaah secara serius.

Namun demikian, ia belum memastikan jadwal pemanggilan ulang Ketua Pansel, karena masih menunggu hasil pembahasan internal komisi.

Sebelumnya, Fenny Apridawati telah memenuhi undangan hearing tertutup Komisi B DPRD Sidoarjo, pada 2 Juni 2026 bersama Kepala Inspektorat Andar Surjadianto, dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amiq.

Sontak saja permintaan pertemuan tertutup tersebut, menuai kritik tajam dari insan jurnalis, atas akses keterbukaan informasi dan transparansi informasinya untuk publik, tentang seleksi Direksi Perumda Delta Tirta.

Mengingat, Perumda Delta Tirta, merupakan bandan usaha daerah layanan publik. Bilamana terkesan demikian, akan menjadi pertanyaan besar tentang keterbukaan dan transparansi sistem, mekanisme, dan proses seleksinya.

Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan komitmennya, mengawasi seluruh tahapan seleksi direksi Perumda Delta Tirta, agar berjalan profesional, transparan, objektif, serta bebas dari intervensi dan kepentingan pihak mana pun.



# INFO MEDIA PERS

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

### Heboh! Dugaan Kunci Jawaban di Kaki Kiri Peserta Seleksi Direksi Perumda Delta Tirta, Dewan Sidoarjo Siap Panggil Ketua

Republikjatim.Com  
Minggu, 07 Jun 2026 15:31 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Proses seleksi calon anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo kembali diterpa isu tak sedap. Pimpinan dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dalam waktu dekat berencana memanggil kembali Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Fenny Abridawati.

Pemanggilan ini, menyusul adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oknum peserta seleksi calon Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

Dugaan kecurangan itu mencuat, saat pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) yang digelar di Gedung Psikologi dan Sumber Daya Manusia Mapolda Jatim, Rabu 3 Juni 2026 kemarin.

Selasa, 09 Jun 2026 09:39 WIB

### Krisis Kepemimpinan Bayangi OPD, Dewan Desak BKD Sidoarjo Segera Isi Ratusan Jabatan Kosong dari Kadis hingga Kasek

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan itu, melalui pesan singkat dari nomor misterius.

"Tidak diketahui nama pengirimnya, hanya nomor saja," ujar Bambang Pujianto saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (07/06/2026).

Meskipun identitas pengirim masih abu-abu, Bambang menegaskan pihaknya tetap menghargai informasi tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Komisi B berkomitmen untuk menindaklanjuti pengaduan itu. Namun, terkait kepastian jadwal pemanggilan Ketua Pansel, Bambang menyebut hal itu masih harus dimatangkan di tingkat Komisi B DPRD Sidoarjo.

"Masih kita rapatkan internal (Komisi B DPRD Sidoarjo) dulu," ungkap Bambang singkat yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, pesan pengaduan yang masuk ke Ketua Komisi B itu, mengungkap modus operandi dugaan kecurangan yang dinilai cukup berani. Pengadu mengklaim melihat langsung adanya dua peserta yang membidik posisi Direktur Pelayanan dan Direktur Operasional yang diduga saling bekerja sama menggunakan contekan.

"Salam Hormat, saya sampaikan kepada Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2026, saat pelaksanaan Ujian Psikometri saya melihat secara langsung ada 2 orang peserta ujian yang memiliki kunci jawaban ditulis dengan bolpoint pada kaki kiri, bunyi petikan pengaduan itu.

Selasa, 09 Jun 2026 08:46 WIB

### Dinodal 2 Peserta 'Ngerpek' Saat Seleksi Direksi PDAM Sidoarjo, Eks Jubir Subandi - Mimik Desak Wawancara Disiarkan Live

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2026, saat pelaksanaan Ujian Psikometri saya melihat secara langsung bahwa ada 2 orang peserta ujian yang memiliki kunci jawaban ditulis dengan bolpoint pada kaki kiri mengenai soal pilihan ganda mencocokkan gambar dan hitung hitungan, peserta tersebut adalah calon Direktur Pelayanan atas Nama : ..... Kemudian mereka berkolaborasi dengan Calon Direktur Operasional, atas nama:.....

Aksi lancung itu, diduga terjadi saat peserta tengah berjabaku menyelesaikan soal pilihan ganda berupa pencocokan gambar dan hitung-hitungan. Pengadu, yang diduga kuat juga merupakan salah satu peserta seleksi, menambahkan bahwa bukti kecurangan itu sebenarnya bisa dilacak melalui rekaman kamera pengawas.

"CCTV sekira pukul 16.30 WIB atau menjelang Maghrib. Saya meminta kedua calon itu, untuk didiskualifikasi bila terdapat kecurangan pada pelaksanaan ujian," tegas pengadu dalam pesan penutupnya.

Isu kecurangan ujian psikometri ini menjadi babak baru dari rentetan sorotan tajam yang mengarah ke Pansel Perumda Delta Tirta. Pasalnya, hanya sehari sebelum ujian di Mapolda Jatim berlangsung, tepatnya Selasa (02/06/2026), Ketua Pansel Fenny Abridawati sebenarnya baru saja memenuhi panggilan pertama Komisi B DPRD Sidoarjo.

Senin, 08 Jun 2026 19:02 WIB

### Cegah Krisis, Pemkab Sidoarjo Perkuat Tindakan Sampah dari Hulu - Hillir Hidupkan 86 TPS Berkinerja Rendah dan 25 Mangkrak

Pada hearing (dengar pendapat) perdana yang digelar tertutup itu, Fenny hadir bersama Kepala Inspektoral Andar Surjadianto serta Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan M Bahrul Amiq. Panggilan pertama itu, dipicu isu miring lain, yakni dugaan lolosnya peserta yang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan administrasi.

Dalam pertemuan itu, Komisi B dengan tegas mengingatkan DPRD Sidoarjo akan terus mengawal dan mengawasi ketat seluruh tahapan seleksi hingga tuntas. Lembaga legislatif ini mendesak Pansel agar bekerja secara profesional, transparan, objektif, serta steril dari intervensi maupun kepentingan kelompok mana pun.

Kini, dengan munculnya babak baru dugaan "kunci jawaban di kaki kiri", publik Sidoarjo menunggu ketegasan Pansel dan DPRD Sidoarjo demi menghasilkan jajaran Direksi Delta Tirta yang bersih dan berintegritas. Hel/Waw

Editor : Redaksi



Daerah

# Jatim Darurat HIV/AIDS, Sidoarjo Episentrum Ancaman Baru Anak-anak dan Catin Positif

Ruang Nurudin | Minggu, 7 Juni 2026 | 68 | Cetak

Facebook | Twitter | WhatsApp | Pinterest | Threads

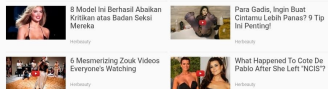


Kasus HIV Sidoarjo membus 7377 penderita. Anak-anak dan calon pengantin positif terdeteksi, memicu kekhawatiran serba masyarakat luas. (1)

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

**Sidoarjo, Ruang.co.id** - Di balik laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak, Sidoarjo menyimpan persoalan kesehatan yang kian mengkhawatirkan.

HIV/AIDS berkembang, menjadi anggapan ancaman serius, yang tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah kelompok tertentu.



Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo per April 2026 mencatat, jumlah kasus HIV kumulatif mencapai 7326. Angka tersebut, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penanganan HIV di Kabupaten Sidoarjo, dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Hanya dalam beberapa bulan, jumlah kasus melonjak dari 6788 pada Desember 2025 menjadi 7329 kasus. Itu terungkap dalam pengabdian (hearing) Komisi D DPRD Sidoarjo.

Hearing itu, dihadiri pejabat Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, dan penurus Pajuyuban Remaja Peduli HIV/AIDS (Parpa) Sidoarjo, pada Kamis (4/6/2026).

Kemudian angka HIV itu, memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pencegahan, edukasi, serta penanganan terhadap kelompok berisiko.

Komisi D DPRD Sidoarjo menilai, kondisi tersebut sebagai sinyal bahaya yang membutuhkan respons cepat dan tenak.

Komisi D mengingatkan pemerintah daerah, agar tidak membiarkan peningkatan kasus berkembang menjadi situasi darurat kesehatan.

## Baca juga: 164 PNS Sidoarjo Pensiun: Lembangan Baru Pengabdian Tanpa Batas Waktu

"Lha ini kan luar biasa, harus kita antispasi. Jangan sampai kemudian Sidoarjo menjadi kabupaten darurat HIV," tegas Dharmori Chudori, Ketua Komisi D, Kamis (4/6/2026).

"Kami dari Komisi D mengimbau, mendorong kepada daerah, melalui Bappeda, untuk segera menyusun aksi daerah atau action plan, terkait perlindungan dan juga pencegahan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ini mengkhawatirkan," pungkasnya.

Hasil pembahasan terhadap dokumen Analisis Situasi HIV-IMS, Dinkes Sidoarjo menunjukkan persoalan tidak hanya berada pada penambahan kasus baru. Tantangan terbesar, justru muncul pada keberlanjutan pengobatan pasien yang telah terdiagnosis.

Data cascade HIV mencatat 875 pasien hilang dari pemantauan atau lost to follow up, setelah menjalani terapi antiretroviral (ARV). Selain itu, 225 pasien lainnya tercatat terputus dari layanan, setelah diagnosis maupun perawatan.

Fakta yang lebih mengkhawatirkan terlihat pada angka kematian. Hingga April 2026, sebanyak 1672 orang dengan HIV/AIDS dilaporkan meninggal dunia, atau sekitar 23 persen dari total kasus kumulatif yang pernah ditangani.

Meski layanan telah diperluas melalui 31 puskesmas, rumah sakit, klinik komunitas, hingga layanan PAD, tingginya mobilitas penduduk sebagai wilayah penyangga Surabaya tetap menjadi tantangan besar.

Komisi D DPRD mendesak penyusunan Rencana Aksi Daerah, sebagai implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017.

Di balik 7329 kasus itu, tersimpan ribuan kisah perjuangan hidup, stigma sosial yang kerap menyudutkan, dan masa depan kesehatan masyarakat Sidoarjo yang sedang dipertaruhkan.

## Alarm Serang HIV Sidoarjo 7329 Kasus, DCC Anggap 8igma Baru Prestasi bukan Ancaman

Epidemi HIV/AIDS di Indonesia masih menjadi ancaman serius. Separang 2025, tercatat 63.297 kasus baru secara nasional dan Jawa Timur, menempati posisi tertinggi dengan 10.412 kasus.

Data tersebut, menempatkan Jawa Timur sebagai wilayah dengan beban HIV/AIDS terbesar di Indonesia. Di balik dominasi itu, Surabaya tertinggi dan Sidoarjo sebagai runner up, muncul sebagai daerah dengan jumlah kasus paling meningkat.

Hingga Mei 2026, Kabupaten Sidoarjo mencatat sekitar 7.377 kasus kumulatif dengan tambahan 248 kasus baru. Angka tersebut menempatkan daerah ini sebagai salah satu kantong epidemi terbesar di Jawa Timur.

Investigasi terhadap pola penyebaran menunjukkan tingginya mobilitas penduduk, urbanisasi, pertumbuhan kawasan industri, dan aktivitas ekonomi, menjadi faktor yang memperbesar risiko penularan di wilayah penyanggah metropolitan Surabaya.

Fenomena tersebut diperkuat dengan banyaknya pasien dari luar daerah, yang menjalani terapi antiretroviral atau ARV di Fasilitas layanan kesehatan - Perawatan, Dukungan & Pengobatan (PDR), di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan data kumulatif pendampingan Yayasan Delta Crisis Center mulai 2008 sampai dengan 13 Juni 2026, setidaknya 554 orang dengan terdiagnosis di luar Sidoarjo.

Sedang untuk yang ber-ekTP di luar Sidoarjo sebanyak 1.543 orang dari total data 5.003 orang dampingan. Sebelahnya, ber-ekTP Sidoarjo. Demikian kata Ferry Efendi, Direktur Program DCC kepada Ruang.co.id. Sabtu sore (6/6/2026).

Kondisi itu, menjadikan Sidoarjo bukan hanya daerah dengan kasus tinggi, melainkan juga pusat layanan HIV/AIDS yang melayani pasien lintas kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Data Yayasan Delta Crisis Center, mencatat 303 kasus baru hingga 13 Juni 2026. Sebelumnya, sepanjang 2025 tercatat 679 kasus baru yang tercatat yang telah ditangani dan didampingi.

Temuan tersebut menunjukkan, HIV tidak lagi konterentral pada kelompok tertentu. Penyebarannya telah memasuki ruang keluarga, pasangan suami istri, anak-anak, hingga calon pengantin (Catin), yang hendak membangun rumah tangga.

"Alarm serius, terlihat pada kelompok usia produktif. Rentang usia 26 hingga 40 tahun mencapai 2.237 kasus, sedangkan kelompok usia 41 hingga 55 tahun tercatat sebanyak 1.635 kasus," ungkap Ferry, Sabtu (6/6/2026).

Kelompok usia muda, juga mulai menunjukkan peningkatan. Sebanyak 478 kasus ditemukan pada usia 16 hingga 25 tahun, meredakan pertanya penguatan edukasi dan pencegahan sejak dini.

Temuan baru yang memantik perhatian publik, terdeteksinya 14 calon pengantin positif HIV, saat menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan berlangsung.

"Kasus tersebut, menghadirkan dilema etik dan hukum. Pendamping berkewajiban mencegah penularan kepada pasangan, namun status HIV tetap menjadi hak pribadi yang tidak dapat dibuka tanpa persetujuan pemilik data," ungkapnya lagi.

Ancaman lain muncul pada kelompok anak-anak. DCC mencatat 13 anak usia nol hingga lima tahun, serta 44 anak usia 6 hingga 15 tahun, masuk dalam program pendampingannya.

"Mayoritas kasus anak terpad, akibat penularan dari ibu, baik selama masa kehamilan, persalinan, maupun menyusui. Kondisi tersebut mengperlihatkan pentingnya pencegahan penularan dari ibu kepada anak," ungkap Ferry lagi.

Di sisi lain, sebanyak 314 pasien tercatat meninggal dunia secara kumulatif hingga 2026. Kelompok usia 41 hingga 55 tahun, menjadi penyumbang angka kematian tertinggi.

DCC juga mencatat, 448 pasien hilang kontak. Fakta ini menunjukkan tantangan terbesar, bukan hanya menemukan kasus baru, melainkan memastikan pasien tetap menjalani terapi secara konsisten dan berkelanjutan.

## Baca juga: Bunda PAUD Sidoarjo Kawal Sekolah Ramah Anak di Sawahon

Menurut pendamping HIV DCC Plus, tingginya angka temuan kasus, tidak selalu berarti penularan baru sedang melanda. Banyak pasien yang baru terdiagnosis saat ini, diduga telah terinfeksi lima hingga sepuluh tahun sebelumnya.

Karena itu menantang, meningkatnya angka temuan kasus, justru dapat menjadi indikator baik bahwa kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berjalan lebih efektif, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sebagai upaya deteksi dini terhadap penularan HIV.

"Stigma lama beranggapan bahwa tingginya angka temuan dan deteksi pengidap HIV, dapat dinilai sebagai kegagalan pemerintah setempat dalam menangani kasus HIV. Tapi menurut Delta Crisis justru tingginya angka temuan mengindikasikan bahwa, semua elemen yang bergerak dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam upaya membongkar jumlah kasus yang sebenarnya, yang sering dibarengkan sebagai fenomena gunung es, dan keberanian terungkap pasti untuk diagnosis etologi-tingginya," tips Ferry.

"Karena secara kumulatif dari tahun ke tahun, pengidap HIV pasti terus meningkat dan tidak mungkin secara kumulatif dibuat zero HIV," tandasnya.

Jadi, menurut Ferry, target besar Program Pencegahan & penanggulangan HIV adalah 3 Zero HIV, yakni pertama, Zero New HIV Infections - Tidak Ada Infeksi HIV Baru.

Kedua, Zero Discrimination - Tidak Ada Diskriminasi Terhadap ODHV. Sedangkan ketiga, Zero AIDS-Related Deaths. Tidak ada kematian akibat AIDS.

"Selain itu, Penguatan program kolaborasi TB/ HIV juga perlu ditingkatkan, mengingat TB merupakan infeksi penyerta paling banyak bagi penderita HIV," jelasnya.

"Namun demikian, Yayasan DCC mengimbau, di balik angka HIV/AIDS, terdapat keluarga yang berjuang mempertahankan harapan, anak-anak yang membutuhkan perlindungan, serta masa depan yang bergantung pada keberhasilan kerja bersama lintas sektor mulai dari masyarakat sosialsada sebagai upaya pencegahan, keberhasilan upaya pendampingan, dukungan dan pengobatan terhadap penderita HIV, demi baik, psikologi dan sosial yang lebih sehat, baik dan berkualitas, meski virus masih sulit untuk dihilangkan sepenuhnya dari tubuh mereka," Pungkasnya.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

EKSKLUSIF.CO.ID



Home Kepolisian TNI DPR MPR Olahraga Pemerintah Kriminal Advetor



Beranda > Pemerintah >

Pemerintah

## Pemkab Sidoarjo Perkuat Penanganan Sampah Berbasis Digital, Antisipasi Kapasitas TPA Jabon

Meja Redaksi 3 Min Baca  
Juni 8, 2026



**SIDOARJO, Eksklusif.co.id** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memetakan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai wilayah sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain pemetaan TPS 3R, Pemkab Sidoarjo juga mengembangkan sistem pengelolaan persampahan berbasis digital serta meningkatkan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Jabon, yang diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan apabila pola pengelolaan saat ini tidak segera dibenahi.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolaboratif oleh seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT hingga masyarakat.

“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi dengan tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait TPS 3R di Opsroom, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, seluruh kebijakan penanganan sampah akan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa langkah pembenahan harus segera dimulai agar persoalan sampah tidak semakin kompleks di masa mendatang.

“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan dashboard digital dalam pengelolaan persampahan. Sistem tersebut nantinya digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.

“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.

Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh TPS 3R yang ada. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah guna memperkuat kapasitas pengelolaan sampah di tingkat desa.

Berdasarkan data DLHK Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap harinya.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

(Red/Alif)

1791 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini



## Komisi A Desak BKD Segera Isi Kekosongan Jabatan Strategis di Lingkungan Pemkab Sidoarjo

by RadarJatim — 9 Juni 2026 in Politik

0



H. Rizza Ali Faizin, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo.



**SIDOARJO (RadarJatim.id)** – Tidak hanya ratusan jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang mengalami kekosongan jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo.

Akan tetapi, sedikitnya ada sekitar 5 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang akan memasuki masa purna tugas pada tahun 2026 ini. Hal ini dinilai berpotensi mengganggu kinerja pelayanan publik, apabila tidak segera diantisipasi sejak dini.

Untuk itu, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo agar segera melakukan langkah percepatan pengisian jabatan, tanpa menunggu kekosongan terjadi.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin mengatakan bahwa proses regenerasi jabatan seharusnya sudah dipetakan jauh sebelum masa pensiun tiba. Karena keterlambatan pengisian jabatan hanya akan berdampak pada terganggunya efektivitas birokrasi.

“Harusnya sebelum pejabatnya pensiun sudah disiapkan pengganti. Jadi begitu pensiun, langsung terisi, tidak ada kekosongan jabatan,” kata H. Rizza saat ditemui awak media dikantornya, Senin (8/6/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai bahwa keberadaan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah posisi strategis bukanlah solusi ideal jika dibiarkan berlangsung terlalu lama. Apalagi di beberapa kasus, satu orang pejabat ada yang merangkap beberapa jabatan sekaligus yang dinilai tidak efektif untuk pelayanan publik.

Komisi A juga mendorong BKD Sidoarjo untuk lebih proaktif dalam melakukan pemetaan jabatan yang akan kosong, terutama di level Kepala OPD dan jabatan strategis lainnya. Dengan begitu, proses seleksi dan mutasi bisa dilakukan lebih cepat dan terukur.

“Kita sudah komunikasikan agar segera ditindaklanjuti. Jangan sampai ada kekosongan terlalu lama, karena ini berdampak langsung ke pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Kepala Satuan Koordinator Wilayah Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Kasatkorwil Banser NU) Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu meminta agar seluruh proses regenerasi jabatan dilakukan lebih tertib dan terencana.

“Agar tidak terjadi penumpukan tugas pada pejabat Plt yang berpotensi menurunkan kualitas layanan publik, termasuk di sektor pendidikan dan administrasi pemerintahan,” terangnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat eselon II yang telah dan akan memasuki masa pensiun diantaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo Widiyantoro Basuki, Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirta Adi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo RT. Notopuro Atok Irawan, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Noer Rochmawati (pensiun 1 Juli 2026) serta Sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Suahyono (pensiun 1 Oktober 2026). (mams)